

**PENGARUH PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA
(LPD) DI KOTA DENPASAR**

**Putu Krishna Aryastha Mahaendrayasa¹
I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: krishnaaryastha@yahoo.com / telp: 081239036417

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance perlu diterapkan LPD, karena dapat mengurangi konflik keagenan antara pemilik LPD dan Pengelola LPD, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD. Corporate Governance mengandung konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Manajer perusahaan diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan informasi yang dimiliki, manajer dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan ke pada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keberhasilan LPD dapat dilihat dari tingkat kesehatan LPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness) terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 LPD dengan 70 responden. Penentuan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen dan uji asumsi klasik untuk keakurasian hasil analisis regresi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance: accountability, independency, dan fairness berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparency dan responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar.

Kata kunci : transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, kinerja keuangan

ABSTRACT

Good Corporate Governance is a corporate governance that explains the relationship between all stakeholders in organized and organized business. Principles of Good Corporate Governance need to be applied by LPDs, as they can reduce agency conflict between LPD owners and LPD Managers, thus increasing the performance of LPDs. Corporate Governance contains the concept of separation between ownership and control of the company. Company managers are authorized to run the company and make decisions on behalf of the owner. With information owned, managers can act only to benefit themselves by sacrificing the interests of the owner, so that the information conveyed to the owner is not in accordance with the actual company conditions. The success of LPD can be seen from LPD health level. This study aims to determine the influence of Good Corporate Governance principles (transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness) on the financial performance of Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) in Denpasar City. The number of samples used in this study were 35 LPDs with 70 respondents. Determination of sample using nonprobability sampling method with saturated sample technique. Analytical technique used is multiple linear regression, and previously done instrument testing and classical assumption test for the accuracy of regression analysis results. Based on the result of hypothesis pengujian known that the principles of Good Corporate Governance: accountability, independency, and fairness have positive and significant influence, while transparency and responsibility have positive and insignificant effect on financial performance of LPD in Denpasar City.

Keywords: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, Performance, Finance*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di masing-masing desa adat/desa pekraman. LPD pertama kali didirikan pada tahun 1984 sebagai lembaga milik desa yang membantu masyarakat desa untuk memperoleh dana, baik yang dipergunakan sebagai modal usaha maupun kegiatan lainnya.

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pekraman yang telah berkembang, memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suartana, 2009:12). LPD menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit, utamanya dari dan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di desa adat tempat LPD didirikan.

Pada dasarnya praktek kerja LPD tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain, baik formal maupun informal. Kaidah-kaidah manajemen yang digunakan LPD lebih sederhana dan disesuaikan dengan lingkungan tempat didirikannya.

LPD mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut : (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, (3) sebagian dari laba LPD langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanaai kegiatan adat, sehingga merupakan salah satu unit usaha desa adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa (Partamawati, 2009).

LPD memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil usaha LPD tersebut telah dikontribusikan sesuai fungsi LPD untuk membangun desa pekraman, yaitu melalui kontribusi bagian laba LPD sebesar 20 persen untuk pembangunan desa pekraman, sedangkan 60 persen untuk modal LPD, 5 persen untuk dana sosial, 5 persen untuk dana pembinaan, pengawasan, dan perlindungan serta 10 persen sisanya untuk jasa produksi.

LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa yang berada di wilayah desa dan diperuntukan untuk masyarakat desa. LPD dimiliki oleh krama desa di wilayah tertentu dan terikat oleh adat dan budaya desa tersebut. LPD dikelola terpisah dengan lembaga krama desa, sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, diperlukan sistem yang baik, pengawasan yang efektif, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerja suatu perusahaan (LPD) (Deby, 2014). Menurut Shil (2008), konflik keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Untuk

memperkecil kemungkinan terjadinya konflik keagenan dalam perusahaan (LPD), maka diperlukan pengelolaan usaha (*corporate governance*) yang baik yang diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara agen dan prinsipal.

LPD wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG,) karena dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD dengan pemilik, yaitu krama desa serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD. *Corporate Governance* mengandung konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Manajer perusahaan diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan informasi yang dimiliki, manajer dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan ke pada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Secara umum GCG adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. Tujuannya untuk mempertahankan hak semua pemangku kepentingan (Shanikat dan Abbadi, 2011). GCG dikembangkan untuk memastikan bahwa investor mendapatkan laba atas investasinya (Iu dan Batten, 2001). Menurut Yoseph (2012), setiap perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan dan mengevaluasi kinerjanya secara berkesinambungan agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu prinsip-prinsip GCG wajib diterapkan oleh LPD untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD sebagai agen dengan pemilik yaitu

krama desa dan antara pengelola LPD dengan kreditur yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi dan tujuan LPD itu sendiri (Meitradi dan Asri, 2016). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu aturan dan mekanisme agar memaksimalkan kinerja perusahaan dengan menerapkan GCG pada perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan (Sri, 2010). Kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa pendekatan rasio keuangan, baik likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas maupun rasio pasar (Dian, 2012). Menurut Krismaya (2014), kinerja keuangan dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Tingkat kesehatan LPD pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan empat faktor, yaitu : 1) permodalan (*capital*), 2) kuatitas aktiva produktif (*asset*), 3) rentabilitas (*earning*), dan 4) likuiditas (*liquidity*). Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dari hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu (Krismaya, 2014). Penilaian kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan yang dinilai secara kuantitatif atau dalam bentuk uang yang dapat dilihat, baik dari segi pengelolaan, pergerakan maupun tujuannya.

Kinerja keuangan LPD dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Penilaian kesehatan LPD berdasarkan SK BPD Bali No. 0193.02.10.2007.2, metode yang digunakan adalah Capital, Aset, Earning, dan Liquidity (CAEL).

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan LPD sangat penting, karena langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan LPD secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD (Krismaya, 2014). Prinsip-prinsip GCG terdiri dari *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Menurut Dominikus (2014), penerapan *corporate governance* tidak hanyatergantungan pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan tergantung pada integritas dan likuiditas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance*.

Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak, baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Oliver (1995), *corporate governance* muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi. Menurut *Organizational for Economic Co-operation and Development* (OECD, 1999), *corporate governance* merupakan suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara

manajemen perusahaan, dewan direksinya (dewan direksi dan komisaris, untuk negara-negara yang menganut sistem hukum *two-tier*, termasuk Indonesia), para pemegang sahamnya dan stakeholder lainnya. *Good corporate governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien.

Konsep GCG mengacu pada peraturandan standar yang mendefinisikan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan seperti karyawan, pemasok, kreditur, konsumen, pemegang saham, pemegang obligasi (Kim, 2006). Menurut Thomas (2006), *good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Menurut Purwani (2010), jika pelaksanaan GCG tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktifitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga kinerja perusahaan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.

Keberadaan LPD mengikuti jumlah desa adat yang ada di Bali. Kota Denpasar merupakan wilayah pembangunan yang memiliki potensi dalam bidang

perdagangan, industri kecil, dan rumah tangga. Sebagai daerah penyangga secara sosial ekonomi pasti memberikan dampak perubahan-perubahan, baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi. Untuk mengantisipasi adanya hal yang bersifat negatif akibat proses pembangunan, maka diperlukan adanya perangkat dan kelembagaan yang bersifat daerah yang mampu membantu masyarakat setempat dan diharapkan menjadi modal untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah LPD di Kota Denpasar dan untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan nilai tingkat kesehatan LPD. Adapun tingkat kesehatan LPD di Kota Denpasar disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Tingkat Kesehatan LPD di Kota Denpasar Per Desember 2015

No	Nama LPD	Asset (Ribuan Rupiah)	Laba (Ribuan Rupiah)	Nilai Kes.	Predikat	Karyawan		Jumlah (Orang)
						L	P	
Denpasar Barat								
1	Denpasar	5.237.898	15.074	96.06	Sehat	5	4	9
2	Padangsambian	126.078.406	4.620.045	96.49	Sehat	15	13	28
Jumlah		131.316.304	4.773.119			20	17	37
Denpasar Selatan								
1	Intaran	98.637.335	1.729.405	69.53	Cukup Sehat	22	17	39
2	Kepaon	80.189.349	3.084.877	80.62	Sehat	14	10	24
3	Panjer	92.657.266	4.646.080	98.50	Sehat	13	11	24
4	Pedungan	92.232.333	4.374.666	99.00	Sehat	14	12	26
5	Pemogan	69.879.706	3.553.370	98.00	Sehat	12	8	20
6	Penyaringan	15.676.928	426.053	98.00	Sehat	5	7	12
7	Renon	17.937.999	899.949	82.98	Sehat	10	5	15
8	Sanur	24.055.529	962.816	95.00	Sehat	3	6	9
9	Serangan*	1.692.804	16.204	48.51	Tidak Sehat	2	7	9
10	Sesetan	39.874.350	1.615.979	98.50	Sehat	11	10	21
11	Sidakarya	44.368.492	833.819	84.74	Sehat	7	15	22
Jumlah		577.202.091	21.693.218			113	108	221
Denpasar Timur								
1	Anggabaya	4.107.200	85.001	92.65	Sehat	2	5	7
2	Bekul	28.574.114	1.108.736	80.93	Sehat	7	4	11
3	Kesiman	151.529.672	6.047.756	99.00	Sehat	23	15	38
4	Lap-lap	4.140.239	216.606	91.63	Sehat	3	4	7
5	Pagan	6.306.821	162.755	95.77	Sehat	4	4	8
6	Penatih	19.898.490	853.469	98.50	Sehat	9	2	11

7	Penatih Puri	2.581.429	180.028	98.00	Sehat	2	3	5
8	Poh Manis	13.579.735	764.006	98.50	Sehat	4	4	8
9	Sumerta	26.505.268	1.431.617	98.50	Sehat	8	6	14
10	Tanjung Bungkak	43.635.347	1.048.471	98.00	Sehat	15	7	22
11	Tambawu	19.438.079	1.109.921	98.00	Sehat	6	4	10
12	Yang Batu	11.889.896	226.607	80.88	Sehat	1	7	8
	Jumlah	332.186.290	13.234.973			84	65	149
Denpasar Utara								
1	Cengkilung	2.049.181	70.935	98.50	Sehat	2	2	4
2	Jenah	4.317.357	262.159	98.50	Sehat	2	3	5
3	Kedua	2.225.602	54.375	98.00	Sehat	-	3	3
4	Oongan	4.286.665	146.285	79.77	Cukup Sehat	5	4	9
5	Peguyangan	66.463.180	2.259.451	98.50	Sehat	10	11	21
6	Peninjoan	21.911.119	438.082	97.00	Sehat	4	5	9
7	Peraupan	11.603.448	508.756	98.50	Sehat	-	6	6
8	Poh Gading	66.262.668	2.549.358	98.00	Sehat	9	9	18
9	Tonja	4.582.947	124.365	98.00	Sehat	2	5	7
10	Ubung	95.658.475	4.164.719	98.00	Sehat	9	10	19
	Jumlah	279.360.642	10.578.485			43	58	101
	TOTAL	1.320.065.327	50.279.795			260	248	508

Sumber : LP LPD Kota Denpasar, 2015

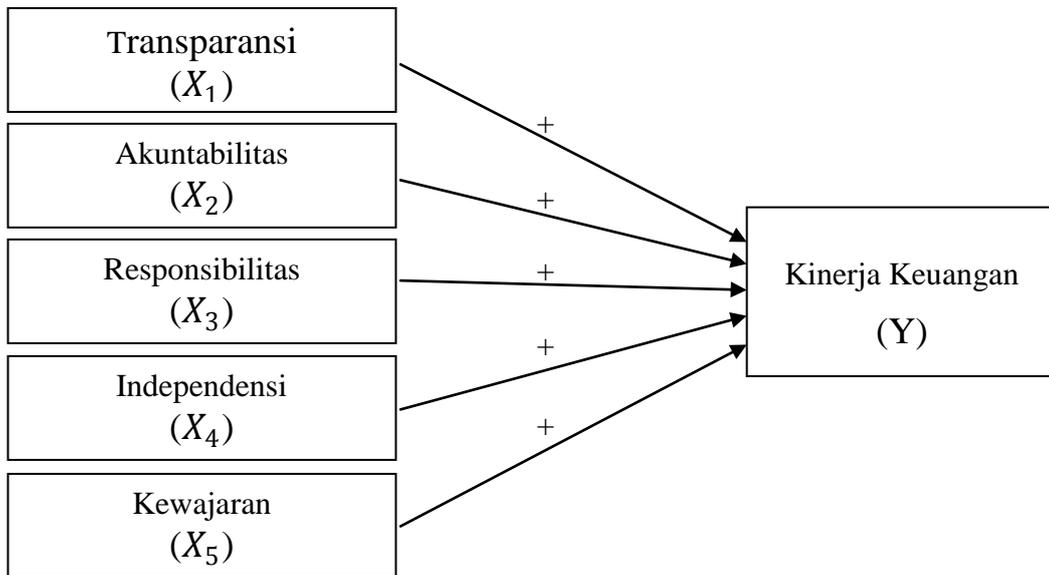
Berdasarkan Tabel 1 jumlah LPD di Kota Denpasar yang tergolong sehat sebanyak 32 LPD, 2 LPD tergolong cukup sehat, yaitu LPD Intaran dan LPD Oongan, 1 LPD tergolong tidak sehat, yaitu LPD Serangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Menurut Sugiyono (2010:13), pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini berbentuk asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Rahyuda, 2004:17). Desain penelitian merupakan perencanaan terhadap penelitian yang akan dilakukan yang

bertujuan untuk menyelenggarakan penelitian, sehingga memperoleh logika, baik dalam pengujian terhadap hipotesis ataupun dalam menarik simpulan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh prinsip GCG terhadap kinerja keuangan. Data primer juga digunakan untuk mendukung hasil penelitian ini melalui kuisioner.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan program *SPSS for windows*. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat dari Gambar 1.



Gambar 1.
Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Lembaga perkreditan Desa di Kota Denpasar

Berdasarkan Gambar 1.dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e. \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

Y	= Variabel terikat (kinerja keuangan)
a	= konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4, b_5	= Koefisien regresi untuk X_1, X_2, X_3, X_4, X_5
X1	= Variabel bebas (transparansi)
X2	= Variabel bebas (akuntabilitas)
X3	= Variabel bebas (responsibilitas)
X4	= Variabel bebas (independensi)
X5	= Variabel bebas (kewajaran)
e	= Kesalahan pengganggu (<i>Standar Error</i>)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Departemen dalam negeri mengadakan seminar mengenai kredit pedesaan di Semarang pada Februari 1984, dari hasil seminar tersebut Pemerintah Provinsi Bali memutuskan untuk mendirikan lembaga keuangan pedesaan yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD), pendirian LPD ini dirintis dan diputuskan oleh Gubernur saat itu, yakni Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Pada tahun 1984 didirikan LPD pertama sebagai proyek percontohan yang kemudian diikuti oleh yang lain di tahun-tahun berikutnya. Operasional LPD selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Daerah Bali No. 2 tahun 1988, kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah No. 8 tahun 2002, Peraturan Daerah no. 3 tahun 2007, Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008, dan yang terakhir Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012, perubahan ini disebabkan karena cepatnya perkembangan LPD seiring berjalannya waktu.

Pembentukan LPD di daerah Bali didasarkan pada hukum yang disebut dengan Ordonasi Badan Kredit Desa (BKD) yaitu *staatsblad* 375 tanggal 14 September 1929 (Depdagri RI, Dirjen PMD, 1998) dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 972 tanggal 1 November 1984

dan pendirinya dimulai pada tahun anggaran 1984/1985, dengan modal pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Bali.

Pembentukan awal LPD didirikan 8 LPD yang tersebar di tiap kabupaten/kota pada tahun 1985, yang masing-masing digunakan sebagai *pilot project* Pemerintah Bali. Pelaksanaan kedelapan LPD tersebut menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang signifikan. Hal ini terjadi karena mendapatkan dukungan positif dari masyarakat desa tempat LPD tersebut berada, dan keinginan masyarakat untuk memajukan perekonomian desanya, LPD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dengan memecahkan permasalahan kelangkaan permodalan dan mobilitas dana masyarakat desa, untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat lemah yang banyak terdapat didaerah pedesaan. Seiring dengan pembentukan LPD, yang memiliki keterkaitan erat dengan awig-awig (peraturan) desa pekraman, maka LPD memiliki perbedaan karakteristik yang mendasar dengan lembaga keuangan formal/komersial (misalnya Bank).

Uji Validitas dilakukan untuk menguji kuisisioner penelitian, Suatu kuisisioner dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut di mana Tabel 2, menunjukkan hasil uji validitas.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Kode Instumen	Nilai Pearson Correlations	Keterangan
1	Transparansi (X ₁)	X _{1.1}	0.808	Valid
		X _{1.2}	0.894	
		X _{1.3}	0.912	
2	Akuntabilitas (X ₂)	X _{2.1}	0.890	Valid
		X _{2.2}	0.783	

3	Responsibilitas (X ₃)	X _{2,3}	0.816	Valid
		X _{3,1}	0.829	
		X _{3,2}	0.737	
4	Independensi (X ₄)	X _{3,3}	0.758	Valid
		X _{4,1}	0.716	
		X _{4,2}	0.843	
5	Kewajaran (X ₅)	X _{5,1}	0.779	Valid
		X _{5,2}	0.909	
		X _{5,3}	0.860	

Sumber: Lampiran 2 (data diolah 2017)

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini memiliki validasi konstruksi yang baik karena korelasi skor faktor dengan skor total (*Pearson Correlation*) positif dan besarnya diatas 0,3.

Uji Realibilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuisiонер yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) di mana Tabel 3, menunjukkan hasil uji realibilitas.

Tabel 3.
Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Transparansi (X ₁)	0.872	Reliabel
Akuntabilitas (X ₂)	0.771	Reliabel
Responsibilitas (X ₃)	0.725	Reliabel
Independensi (X ₄)	0.778	Reliabel
Kewajaran (X ₅)	0.808	Reliabel

Sumber: Lampiran 3 (data diolah, 2017)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel > 0,70, sehingga dapat disimpulkan pertanyaan dalam kuisiонер tersebut reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan analisis grafik

dan uji statistik (Ghozali, 2012: 160). Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Apabila *Asymp. Sig (2-tailed) > α (0,05)*, maka dikatakan data terdistribusi normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		35
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	6.04235076
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.159
	<i>Positive</i>	0.064
	<i>Negative</i>	-0.159
<i>Kolmogrov-Smimov z</i>		0.939
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.341

Sumber: Lampiran 4 (data diolah, 2017)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0.341 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antara sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% dan VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	Transparansi	0.561	1.784
	Akuntabilitas	0.764	1.340
	Responsibilitas	0756	1.323
	Independensi	0.592	1.689
	Kewajaran	0.569	1.758

Sumber: Lampiran 5 (data diolah, 2017)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak. Nilai signifikan t dari hasil regresi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa dalam model tidak terkandung gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	37.535	20.801		1.804	0.082
	Transparansi	-0.060	0.784	-0.018	-0.076	0.940
	Akuntabilitas	-1.062	0.714	-0.303	-1.488	0.147
	Responsibilitas	-0.115	0.671	-0.035	-0.171	0.865
	Independensi	-0.350	0.852	-0.094	-0.411	0.684
	Kewajaran	0.1113	0.650	-0.041	0.174	0.863

Sumber: Lampiran 6 (data diolah, 2017)

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa nilai Sig. variabel independen berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data umumnya digunakan pengukuran rata-rata (*mean*), sedangkan untuk mengukur perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya digunakan standar deviasi.

Tabel 7.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Transparansi	35	19.00	24.00	21.5000	1.30045
Akuntabilitas	35	19.00	24.00	22.3714	1.23873
Responsibilitas	35	20.00	24.00	22.2571	1.30818
Independensi	35	20.00	24.00	21.7000	1.16442
Kewajaran	35	12.00	18.00	16.0000	1.55771
KinerjaKeuangan	35	48.51	99.00	92.3886	10.41657

Sumber: Lampiran 7 (data diolah, 2017)

Berdasarkan Tabel 7 dipaparkan nilai dalam statistik deskriptif, yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dengan N adalah banyak kasus yang diolah, yaitu 70 kasus. Nilai minimum untuk variabel transparansi sebesar 19,00 dan nilai maksimumnya sebesar 24,00. Untuk variabel akuntabilitas, nilai minimum sebesar 19,00 dan nilai maksimumnya sebesar 24,00. Untuk variabel responsibilitas, nilai minimum sebesar 20,00 dan nilai maksimumnya sebesar 24,00. Untuk variabel independensi, nilai minimum sebesar 20,00 dan nilai maksimumnya sebesar 24,00. Sedangkan nilai minimum untuk variabel kinerja keuangan sebesar 48,51 dan nilai maksimumnya sebesar 99,00.

Nilai *mean* dari variabel menunjukkan besarnya rata-rata penerapan variabel tersebut. Nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan nilai variabel terhadap nilai rata-ratanya sebesar nilai standar deviasi tersebut. Misalkan, mean variabel transparansi adalah 21.5000 berarti rata-rata penerapan transparansi sebesar 21.5000. Standar deviasi sebesar 1.30045 berarti terjadi penyimpangan nilai transparansi terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1.30045.

Hasil pengujian koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada

penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai dari R karena nilai R dapat digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara kedua variabel.

Tabel 8.
Hasil Adjusted R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.815 ^a	0.664	0.606	6.54254

Sumber : Lampiran 8 (data diolah, 2017)

Karena nilai R =0,815 berada diantara nilai 0,80 – 1.000, maka dapat disimpulkan hubungan antara prinsip-prinsip *good corporategovernance* (X) dengan kinerja keuangan (Y) sangat kuat. Kemudian untuk melihat seberapa besar kontribusi *good corporategovernance* mempengaruhi kinerja, dapat digunakan rumus Koefisien Penentu (KP) atau disebut juga dengan koefisien determinasi, yang dirumuskan $KP = R^2 \times 100\% = 0.664 \times 100\% = 66.4\%$ artinya *good corporategovernance* memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan sebesar 66.4% atau dapat disimpulkan sisanya 33.6% kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linear sederhana sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9
Hasil Uji F

Model	Sum of Squeres	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2447.829	5	489.566	11.437	0.000 ^a
Residual	1241.340	29	42.805		
Total	3689.169	34			

Sumber : Lampiran 8 (data diolah, 2017)

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari nilai α (0.05), maka model regresi linear berganda layak digunakan sebagai alat untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Interpretasi persamaan regresi linear berganda digunakan untuk menentukan persamaan dalam penelitian yang dilakukan, yang dapat digunakan untuk menentukan model penelitian dan menjelaskan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 10
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-92.174	30.560		-3.016	0.005
Transparansi	0.064	1.152	0.008	0.056	0.956
Akuntabilitas	3.722	1.048	0.443	3.550	0.001
Responsibilitas	0.351	0.986	0.044	0.356	0.725
Independensi	2.607	1.252	0.291	2.082	0.046
Kewajaran	2.221	0.955	0.332	2.326	0.027

Sumber : Lampiran 8 (data diolah, 2017)

Berdasarkan Tabel 10, maka persamaan regresi linear berganda yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = -92,174 + 0,064X_1 + 3,722X_2 + 0,351X_3 + 2,607X_4 + 2,221X_5$$

Makna dari koefisien regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut : Nilai konstanta - 92,174 memiliki arti apabila prinsip-prinsip *good corporate governance* konstan, maka kinerja keuangan meningkat sebesar -92,174 satuan atau turun sebesar 92,174. Nilai koefisien regresi transparansi (X_1) sebesar 0,064 memiliki arti apabila variabel transparansi meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan meningkat sebesar 0,064 satuan. Nilai koefisien regresi akuntabilitas (X_2) sebesar 3,722 memiliki arti apabila variabel akuntabilitas meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan meningkat sebesar 3,722 satuan. Nilai koefisien regresi

responsibilitas (X_3) sebesar 0,351 memiliki arti apabila variabel responsibilitas meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan meningkat sebesar 0,351 satuan. Nilai koefisien regresi independensi (X_4) sebesar 2,607 memiliki arti apabila variabel independensi meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan meningkat sebesar 2,607 satuan. Nilai koefisien regresi kewajaran (X_5) sebesar 2,221 memiliki arti apabila variabel kewajaran meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan meningkat sebesar 2,221 satuan.

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai *p-value* untuk variabel transparansi sebesar 0,958 lebih besar daripada α (0,05), maka H_1 ditolak. Hasil ini tidak mendukung hipotesis H_1 yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan perusahaan dalam mengungkapkan informasinya, akan tidak signifikan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan dan tidak signifikan mampu meningkatkan kinerja keuangan untuk menambah nilai perusahaan. Hal ini, disebabkan, karena kinerja keuangan yang dicapai sudah optimal.

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai *p-value* untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,001 lebih kecil daripada α (0,05), maka H_2 diterima. Hasil ini mendukung hipotesis H_2 yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Semakin jelas tanggung jawab, wewenang dan hak-kewajiban struktur organisasi dalam perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat.

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai *p-value* untuk variabel tanggung jawab sebesar 0,725 lebih besar daripada α (0,05), maka H_3 ditolak. Hasil ini tidak mendukung hipotesis H_3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan kepatuhan perusahaan pada peraturan dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap *stakeholders* belum signifikan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan, karena kinerja keuangan yang dicapai sudah optimal.

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai *p-value* untuk variabel independensi sebesar 0,046 lebih kecil daripada α (0,05), maka H_4 diterima. Hasil ini mendukung hipotesis H_4 yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Semakin independen perusahaan dalam mengelola usahanya, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan terbebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan, sehingga perusahaan akan mampu meningkatkan kinerjanya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai *p-value* untuk variabel kewajaran sebesar 0,027 lebih kecil daripada α (0,05), maka H_5 diterima. Hasil ini mendukung hipotesis H_5 yang menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola usahanya perusahaan selalu berlandaskan kewajaran dan kesetaraan, maka kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Hal ini terjadi GCG membantu pengelola LPD untuk mengatur bagaimana organisasi dioperasikan dan dijalankan dengan baik. Penerapan GCG secara baik dan konsisten akan membuat segala kegiatan LPD berjalan secara efektif dan efisien, hal ini dikarenakan praktik GCG bertujuan untuk melindungi setiap kepentingan *stakeholders*, sehingga akan menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan LPD. Selain itu GCG dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, lebih bertanggungjawab dan lebih transparan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar, akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar, tanggungjawab berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar, independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar, kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. Dengan mempertimbangkan pengaruh *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, maka diharapkan LPD lain di Bali juga menerapkan *good corporate governance* dengan baik dan menjadikan *good corporate governance* sebagai kultur di dalam perusahaan Peningkatan pembinaan dan pelatihan kepada semua pengurus LPD perlu dilakukan agar pengurus lebih memahami operasional dan tugas-tugas dalam LPD. Selain itu pemahaman mengenai komponen *good corporate governance* juga perlu ditingkatkan karena *good corporate governance* dapat menjadi dasar pengendalian dalam kegiatan LPD.

Badan pengawas perlu melakukan evaluasi kinerja secara rutin untuk mengurangi kemungkinan LPD berada pada tingkat kesehatan yang rendah. Penelitian ini hanya menguunakan 35 LPD yang berlokasi dalam satu kota sebagai sampel, penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian untuk menyempurnakan dan melengkapi penelitian seluruh LPD di Provinsi Bali. Penelitian ini belum memperhitungkan faktor-faktor lain diluar prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan LPD. Untuk itu, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan faktor atau proksi lain, sehingga penelitian dapat digeneralisasi.

REFERENSI

Asri Dwija Putri, I G.A.M. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kearifan Lokal Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung, *Laporan tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar

- Batafor, Gregorius Gehi, 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembaga-Provinsi NTT. *Thesis Program Pascasarjana Universitas Udayana*.
- Deby, Anastasia Meilic Theacini, 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kualitas Laba dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Perusahaan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayarta*, 7(3), h: 733-746
- Dian, Prasinta. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal* 1(2), h: 1-7.
- Dominikus, Octavianto Kresno Widagdo. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegara Journal of Accounting*. 3(3), h: 1-9.
- Eisenhart, Kathleen M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), pp: 57-74.
- Eka Hardikasari, (2011). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. Seri Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Jakarta.
- Ghozali, H. Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi Keenam. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Ketut. 2009. Analisis Faktor Kinerja Organisasi Lembaga Perkreditan Desa di Bali (Suatu Pendekatan Perspektif *Balanced Scorecard*). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 11(2), h: 172-182
- _____. 2011. Peran Falsafah Tri Hita Karana Bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di Bali. *Jurnal Analisis Manajemen*, 5(2), h: 23-36
- Hassan, Shehu Usman and Abubakar Ahmed. 2012. Corporate Governance, Earning Management and Financial Performance: A Case of Nigerian Manufacturing Firms. *American International Journal of contemporary Research*, 2(7),pp:214-266
- Hendra Katjaya, I Wayan. 2014. Pengaruh Tingkat Pengungkapan CSR dan Mekanisme GCG pada Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 8(3), h: 620-629
- Hill, C. W. I. and Thomas M.J. 1992. Stakeholder-Agency Theory. *Jurnal of Management Studies*.29, pp: 131-154

- Irmala, Sari. 2010. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iu, Justin and Batten, Jonathan 2001, The implementation of OECD corporate governance principles in post-crisis Asia, *The journal of corporate citizenship*, vol. 4, pp: 47-62.
- Jensen, Michael C. and Meckling William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 20 Januari 2003, Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Kim, E. 2006. The Impact of Family Ownership and Capital Structure on Productivity Performance of Korean Manufacturing Firm: Corporate Governance and The "Chaebol Problem", *Jurnal of Japanese International Economics*, Vol.20, pp: 209-233
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Kebijakan Good Corporate Governance Indonesia.
- Krismaya, Dewi, Kadek. 2014. Pengaruh penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(3), h: 559-573.
- Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kota Denpasar.
- Meitradi, Setyawan, Komang dan Asri Dwija Putri, I.G.A.M. 2016. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3). h: 586-596.
- Norwani, Norlia M., Zam Zuriati Mohamad, dan Ibrahim Tamby Chek. 2011. cCorporate Governance Failure and Its Impact on Financial Reporting Within Selected Companies. *International Journal of Business and Social Sciese*, 2(21), pp:205-213.
- OECD,. 1999. *OECD Principle of Corporate Governace*
- Oliver Hart.1995. Corporate Governance: Some Theory and Implication. *The Economics Jurnal*, 105(430), pp: 205-213.

- Partamawati, Ni Putu. 2008. Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Mendorong Penggalan Dana Pembangunan Pedesaan di Provinsi Bali. *Sarathi*, 15(1).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002, Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Purwani, Tri. 2010. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Majalah Ilmiah Informatika*. Vol. 1(2), h: 47-60
- Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. 2000. Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, Vol.58,pp:3-27
- Rahyuda, 2004. *Metodelogi Penelitian*. Denpasar: Udayana-Press
- Reny, Dyah Retno M. 2012. Penaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010. *Jurnal Nominal*. 1(1), h: 84-103
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method of Business: Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 2 Edisi 4. Jakarta: Selemba Empat
- Shil, N. C. 2008. Accounting for Good Corporate Governance. *JOAAG*. 3(1), pp:22-31
- Shanikat, Mohammed and Abbadi, Sinan S. 2011. Assessment of Corporate Governance in Jordan: An Empirical Study. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 5(3), pp: 93-106.
- Sri, Rahayu. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Suartana, I Wayan. 2009. *Arsitektur Pengelolaan Risiko pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Udayana University Press
- Sucipto. 2003. *Penilaian Kinerja Keuangan*, Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0193.02.10.2007.2 Tentang Pedoman Sistem Penilaian Terhadap Lambaga Perkreditan Desa (LPD)

- Thomas S. Kaihatu. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), h: 1-9.
- Waseem Al-Haddad, Saleh Taher A., dan Fares Jamil A. S. 2011. The Effect of Corporate Governance on The Performance of Jourdanian Industrial Cpmpanies: An empirical study on Amman Stock Exchange. *International Journal of Himanities and Social Science*, 1(4),pp:55-69
- Yoseph, Yos Sudarso Anastasio Rany. 2012. Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Return on Equity (ROE). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 1(1), h: 1-20